

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto., 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly., 2006, *Pengantar Ilmu Tata Negara*, Sekretariat Jendral dan Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi RI.
- _____, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Syafa'at., 2006, *Teori hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI.
- Al Barry, M. Dahlan., 1995, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Yogyakarta, Arkola.
- A.A.G Peters dan Kusriani Siswosoebroto., 1988, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Attamimi, A. Hamid S., 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara – suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presidean Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun waktu Pelita I- Pelita IV*, (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta).
- Azhary, Muhammad Tahir. 2010, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dori Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Badudu, J.S. dan Sutan Mohammad Zain., 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri, 2009, *Analisis dan Proyeksi Strategis Nasional*, Jakarta.
- Friedman, Lawrence., 1969, *M. The Legal Sistem: A. Social Science Perspektive*, Russel Sage Foundation, New York.
- Hatta, Mohammad., 1982, *Memoir*, Jakarta.
- Handoyo, B. Hestu Cipto., 2014, *Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Indrati S, Maria Farida., 2007, *Ilmu Perundang-undangan I*, Kanisius, Yogyakarta.
- Juanda., 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung.
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Kencana, Inu., 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil., 2004, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kaelan M.S., 2005, *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengemangan Penelitian interdisipliner bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, Paradigma, Yogyakarta.
- Kusnardi, Moh. dan Bintan R. Saragih., 1983, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Gramedia, Jakarta.
- Lubis, Solly., 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Manan, Bagir., 2004, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta.
- Manan, Bagir., 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta : Ind-Hill.Co
- MD, Mafmud., 2003, *dalam Krisisi Masa Kini dan Orde Baru*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Ranggawidjaja, Rosjidi., 1988, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Ratu Perwiranegara, Alamsyah (Menteri Agama 1978-1983)., 1988, *Kehidupan Agama dalam Negara Pancasila*, Departemen Agama, Jakarta.
- Rosidin, Utang. 2015, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung.
- Sabine, George. H. dalam Jimly Asshiddiqie.. 2006, *Hukum Tata Negara Dap Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press, Jakarta.
- Sinamo, Nomensen., 2010, *Hukum Administrasi Negara: Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*, Jalan Permata Aksara, Cetakan Pertama, Edisi revisi, Jakarta.
- Simorangkir, J.C.T. dkk., 2008, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sunarno, Siswanto, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunarno, Siswanto., 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta.
- Sulaiman, King Faisal., 2014, *Dialektika pengujian Peraturan Daerah Pasca otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Saleh, Ruslan., 1979, *Penjabaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perundang-undangan*, Aksara Baru, Jakarta.

Syarif, Amiroeddin., 1987, *Perundang-undangan – dasar, jenis, dan teknik membuatnya*; Bina Aksara, Jakarta.

Soejitno, Irawan., 1983, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.

Tahir, Azhary, Muhammad., 2010. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Tjandra, W. Riawan dan Kresno Budi Darsono., 2009, *Legislative Drafting (Teori dan Teknik Pembentukan Peraturan Daerah)*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Vlies, I.C. Van der Het Wetsbeigrip en beginselen van behoorlijke regelgeving,'s-Gravenhage: Vuga hal.186 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi

Waluyo, Bambang., 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wahjono, Padmo dalam Ni' Matul Huda., 2003, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Jurnal/ Majalah/ Makalah

Asshiddiqi, Jimly. 2015, *Makalah Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta, hal 2.

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM dan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2003, *Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi sebagai Pelaksanaan Hak Politik*, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Jakarta.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Indonesia, 1985, *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta; hlm. 163.

Friedman, Lawrence M. 1969, *On Legal Development*, dalam "Rutgers Law Review" Vol. 24, hlm. 28.

Hendra Pakpahan, Rudy. 2014. *Disharmoni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Dengan Beberapa Undang-undang Terkait Regulasi Pembatalan Peraturan Daerah*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 11: 127-133.

Hartono, Sunaryati. *Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia Sekarang dan Masa Mendatang*, dalam majalah BPHN Departemen Kehakiman No. 1, hlm. 11-26.

Manan, Bagir. 2008, "Kosistensi Pembangunan Nasional dan Penegakan Hukum", Majalah Varia Peradilan No. 275, Hal 10.

Manan, Bagir. 1994 "Ketentuan-ketentuan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembangunan Hukum Nasional" (makalah disampaikan pada Pertemuan Ilmiah tentang Kedudukan Biro-biro Hukum/Unit Kerja Departemen/LPND dalam Pembangunan Hukum, Jakarta, 19-20), hal.1-3

Mahendra, A.A. Oka. 2010, "*Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*", Jurnal Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Jakarta.

Sukriono, Didik. 2011. "*Pembentukan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah*", *Jurnal Hukum Adil Vol.2 No. 2*, Fakultas Hukum Yarsi, Jakarta, hlm 168.

Tim Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, 2009, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Dirjen PP Kemenkumham, Jakarta, hlm. 1.

Waliyadin, M. 2013, *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Implementatif*, Kemenkumham RI, Jakarta, hlm. 11-12

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Prolegnas.

Peraturan Presiden No 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan.

Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan.

D. Internet

Riswanto Tikah Kemal, *Kedudukan Tap MPR dalam Hierarki Perundang-Undangan Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan*, diakses dari riswantotikahkemal.blogspot.co.id, pada tanggal 18 Mei 2016 pukul 21.16.

Daftar Perda dan Kep.KDH yang dibatalkan, Data Tahun 2002-2009, http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2010/03/05/d/a/daftar_kepmen_pembatalan_perda_data_2002-2009.pdf, diunduh pada tanggal 29 April 2016.

Mendagri: 173 Perda Dibatalkan Tahun 2012, <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/01/07/mendagri-173-perda-dibatalkan-tahun-2012>, diunduh pada tanggaln 29 April 2016.

Setiap Tahun Kemendagri Batalkan Ratusan Perda, <http://www.bedanews.com/setiap-tahun-kemendagri-batalkan-ratusan-perda>, diunduh pada tanggal 29 April 2016.

Sejak November 2014 sampai Mei 2015, Mendagri Batalkan 139 Perda, <http://nasional.kompas.com/read/2015/07/22/17054251/Sejak.November.2014.hingga.Mei.2015.Mendagri.Batalkan.139.Perda>, diunduh pada tanggaln 29 April 2016.

Tohari, 2016, Penyusunan Peraturan Daerah, <http://www.hukumpedia.com/twtoha/penyusunan-peraturan-daerah>, Diakses pada 13/12/2016, jam 16.27 WIB